

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Tenggong merupakan desa yang terletak di wilayah kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah 3,29 km. berdasarkan data yang diperoleh jumlah penduduk desa Tenggong adalah 3162 jiwa yang dimana 1579 jiwa laki-laki dan 1579 jiwa perempuan. Desa Tenggong terdiri dari tiga dusun yaitu krajan, troboyo dan sucen. Secara geografis Desa Tenggong termasuk wilayah yang sebagian besar berupa dataran rendah. dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani yang didukung oleh lingkungan alam yang menopang pertanian.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa pembangunan desa harus dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, setiap desa mendapatkan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD) kemudian diserahkan kepada desa melalui Anggaran Belanja Desa (APBDes) untuk pengembangan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.² Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa atau APBDes adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

² Ana Sopanah Dkk, *Akuntansi Publik* (surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), Hlm 43.

keuangan desa.³

Tabel 1.1
Rincian Dana Desa Kabupaten Tulungagung 2023

Kecamatan	Luas wilayah	Dana Desa (Rp)
Kedungwaru	29.74	18.762.940.000
Pakel	36.06	18.209.650.000
Gondang	44.02	17.790.880.000
Boyolangu	38.44	17.415.412.000
Ngunut	37.70	17.309.461.000
Sumbergempol	39.28	16.463.524.000
Rejotangan	66.49	16.186.221.000

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dalam tabel 1.1 rincian dana desa kabupaten Tulungagung tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran Dana Desa di masing-masing kecamatan jumlahnya tidak sama. Kecamatan Rejotangan menduduki urutan ke-7 dalam rincian dana desa terbanyak di Kabupaten Tulungagung, jika dilihat dari luas wilayah kecamatan Rejotangan lebih luas dari kecamatan lainnya akan tetapi kecamatan Rejotangan mendapat dana desa yang lebih rendah. Pengelolaan keuangan yang baik tentunya akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa serta terwujudnya pembangunan desa yang efektif dan efisien.

APBDes merupakan instrumen penting yang menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat Desa. Tata pemerintahan yang baik dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. APBDes disusun dengan berbasis partisipatif, maksudnya yaitu melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, Dalam <https://dpmptd.kaltimprov.go.id/download/permendagri-no-113-tahun-2014-tentang-pengelolaan-keuangan-desa>, diakses pada 13 September 2024

Masyarakat. APBDes berpedoman pada peraturan daerah kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda, hal tersebut tergantung dengan kondisi riil masing-masing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.⁴

Terkait dengan akuntabilitas pengelolaan APBDes, diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atau pelaporan penggunaan dana APBDes. Tujuan dari pengelolaan APBDes ialah untuk menyediakan informasi keuangan secara lengkap detail, cermat serta akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan yang telah berlalu dan untuk dasar pengelolaan keuangan ditahun yang akan datang secara maksimal. Faktor pendukung akuntabilitas ialah transparansi atau keterbukaan. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa juga membutuhkan kompetensi untuk pengelolaan dana desa, tujuannya yaitu untuk pembangunan dan kemajuan desa.⁵

Tabel 1.2
Rincian Dana Desa Kabupaten Tulungagung
Kecamatan Rejotangan Tahun Anggaran 2023

Desa	Luas Km	Jumlah Penduduk	Pagu Dana Desa (Rp)
Banjarejo	3,34	4781	923.263.000
Tegalrejo	2,70	4564	905.583.000
Tenggong	3,29	3162	905.508.000
Pakisrejo	2,17	3058	868.008.000
Jatidowo	1,31	1453	698.720.000

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

⁴ Agustinus B.pati Tesar Walean, Michael S.Mantiri, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Sinsir Kecamatan Modinding Kbupaten Minahasa Selatan,” *Journal Governance* 1 No. 2 (2021), Hlm 2.

⁵ Wakhidah Agusin Rahayu, Yusuf Adam Hilman, “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan APBDes Di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kbupaten Madiun,” *Journal Of Governance and Local Politics* Vol. 8 No. (2020), Hlm 5.

Pada tabel 1.2 rincian dana desa kabupaten Tulungagung Kecamatan Rejotangan Tahun anggaran 2023 menjelaskan bahwa menurut peraturan Bupati Tulungagung di kecamatan Rejotangan, desa Tenggong menduduki urutan ke-14 dalam rincian dana desa terendah di kecamatan Rejotangan, jika dilihat dari luas wilayah desa tenggong lebih luas dari Desa Tegalrejo, tetapi desa Tegalrejo memiliki pendapatan dana Desa yang lebih unggul. Dengan anggaran dana yang minim akan berpotensi menghadapi keterbatasan dalam pembiayaan pembangunan serta pelayanan publik yang optimal. Pengelolaan dana desa yang baik tentunya dapat dipertanggungjawabkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. pemerintah desa tenggong dalam mengalokasikan dana APBDes dengan melihat kebutuhan masyarakatnya, dana APBDes juga digunakan untuk pembangunan dan untuk membantu masyarakat untuk memenuhi kesejahteraannya seperti pembagian sembako.

Tabel 1.3
Laporan Realisasi APBDes Desa Tenggong Periode 2020-2023

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	Surplus (Defisit)
2020	1.636,745.360,91	1.633.944.987,19	2.800.373,72
2021	1.806.734.587,86	1.812.721.445,16	(5.986.857,30)
2022	1.665.363.901,84	1.663.003.707,97	2.360.193,87
2023	1.861.317.704,63	1.860.489.770,73	827.933,90

Sumber: Kantor Balai Desa Tenggong, 2024

Pada tabel 1.3 laporan realisasi APBDes Desa Tenggong Periode 2020-2023 menjelaskan bahwa pendapatan desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tetapi pada tahun 2022 pendapatan desa tenggong mengalami penurunan. Sementara itu, realisasi belanja desa masih rendah dari pada jumlah pendapatan desa atau terjadi surplus anggaran. Tetapi hal tersebut tidak dialami

di tahun 2021, ditahun tersebut desa tenggong justru mengalami defisit anggaran. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pengeluaran yang melebihi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Besarnya realisasi belanja merupakan sebuah wujud penyerapan APBDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. meskipun demikian, masih terdapat pembangunan infrastruktur desa yang belum merata sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait adanya penyimpangan.

Banyaknya kasus penyalahgunaan dana desa membuat penerapan akuntabilitas dan transparansi tidak dilakukan dengan baik. Seperti yang dicatat oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa terdapat 454 total kasus korupsi yang ditindak sepanjang 2018, dimana sebanyak 96 kasus korupsi didalamnya merupakan kasus penyelewengan atas anggaran dana desa. Dampak dari kasus korupsi tersebut menimbulkan kerugian yang besar bagi negara hingga mencapai Rp. 37,2 miliar. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya penyelewengan pada pengelolaan keuangan desa berdasarkan temuan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yaitu terdapat pada aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia, aspek regulasi dan kelembagaan.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Shokhibul Umam yang berjudul “Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati” Hasil penelitian mengenai transparansi pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran

⁶ Faridatul Islamiyah, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak,” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* Vol. 8 No. 1 (2022), Hlm 2.

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati menunjukkan bahwa Pemerintah Desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas. Dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti memiliki persamaan bahwasanya sama-sama meneliti Akuntabilitas Pengelolaan APBDes berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan, sedangkan perbedaannya terletak pada tahun penelitian dan lokasi penelitian.

Penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan karena penulis ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang terdapat di Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung”**

B. Identifikasi dan Batasan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, peneliti memberi batasan atas permasalahan yang ada yaitu difokuskan pada pengelolaan APBDes yang dilaksanakan pemerintah desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung yang akuntabel.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung berdasarkan permendagri No.113 Tahun 2014?
2. Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung berdasarkan permendagri No.113 Tahun 2014?
3. Bagaimana kendala dan solusi pemerintah desa Tenggong dalam penerapan Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?

D. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Mengetahui penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung berdasarkan permendagri No.113 Tahun 2014
2. Menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung berdasarkan permendagri No.113 Tahun 2014
3. Mengetahui kendala dan solusi pemerintah desa Tenggong dalam penerapan Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa secara akuntabel

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah Desa Tenggong, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan maupun evaluasi untuk pemerintah desa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.
- b. Bagi akademik, Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan referensi terkait penerapan akuntabilitas keuangan pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- c. Bagi peneliti selanjutnya, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah bentuk tanggung jawab penyelenggara masyarakat untuk memperjelas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai tahapan semua keputusan dan proses yang dilaksanakan, serta tanggungjawab atas hasil pelaksanaannya tersebut. Sebagai aturan umum, akuntabilitas sektor publik ialah untuk masyarakat dengan indikator hasil produk dan layanan publik (output) tercapai sesuai tujuan.⁷

⁷ Penny Kusumasturi Lukito, *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Kedepan* (Jakarta: Grasindo, 2014), Hlm, 4.

2. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu agar bisa mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan adalah ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.⁸

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan alat untuk mengkoordinasikan aktifitas perolehan pendapatan, penerimaan pembiayaan dan menjadi landasan belanja serta pengeluaran pembiayaan bagi pemerintah desa untuk satu periode tertentu⁹

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penelitian Skripsi memiliki tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal penelitian ini terdiri dari cover, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tulisan, motto, persembahan, prakata, daftar isi, dan abstrak.

⁸ Nugroho, *Good Governance* (Bandung: MandarMaju, 2003) Hlm, 119.

⁹ Siswadi Sululing, *Akuntansi Desa Teori Dan Praktek* (Purwokerto: CV IRDH, 2018) Hlm 56.

2. Bagian Inti

Bagian inti terdiri dari enam bab yang digunakan untuk skripsi antara lain yaitu:

- a. Bagian bab 1 berisi tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.
- b. Bagian bab II berisi tentang kajian pustaka yang digunakan sebagai pedoman penulisan skripsi, berdasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014 yang digunakan sesuai judul penelitian.
- c. Bagian bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan penelitian.
- d. Bagian bab IV berisi tentang hasil data yang sudah diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- e. Bagian bab V berisi tentang penjelasan dari data penelitian dan analisis data yang berhubungan dengan konteks penelitian.
- f. Bagian bab VI berisi penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dan saran yang diberikan kepada pihak yang terkait dalam penelitian berdasarkan dengan hasil lapangan.

3. Bagian akhir

Bagian akhir berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran dan surat yang mendukung jalannya proses penelitian.